



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

#bangga
melayani
bangsa



BULETIN

KEMENKUM KALSEL NEWS

MINGGU KE-

3

JULI 2025



HARMONISASI PRODUK
HUKUM DAERAH HSU



EVALUASI CAPAIAN
KINERJA SEMESTER I



PELANTIKAN NOTARIS
PENGGANTI

DIVISI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAAN HUKUM

DIVISI
PELAYANAN HUKUM

BAGIAN
TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id



Sinergi Lintas Kementerian, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Apel Pagi Bersama Secara Virtual



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Apel Pagi Bersama Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas). Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini diikuti dari Balai Pertemuan Garuda, Senin (14/7/25).

Apel pagi bersama ini diikuti oleh seluruh satuan kerja di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas, termasuk jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan. Hadir dalam kegiatan ini Plt. Kepala Kantor Wilayah, Mediy Firmansyah, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, para pejabat manajerial dan non manajerial, serta seluruh pegawai dari tiga struktur kementerian terkait yang ada di wilayah Kalimantan Selatan, yakni Kementerian Hukum, HAM, dan Imigrasi-Pemasarakatan.

Bertindak sebagai Pembina Apel adalah Menteri HAM, Natalius Pigai. Dalam arahannya, Pigai menegaskan pentingnya menjaga sinergi, soliditas, dan kebersamaan lintas kementerian yang berada di bawah naungan Kemenko Kumham Imipas.

“Kita tidak pernah terpisah karena kita tetap satu dalam lingkup Kemenko,” ujar Pigai mengawali sambutannya.

Pigai juga menyampaikan selamat bergabung kepada para CPNS yang baru direkrut sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia kementerian. Ia menekankan pentingnya membangun kementerian secara kolaboratif tanpa adanya tumpang tindih fungsi.

“Marilah bangun Kementerian ini dengan bersama-sama dengan meningkatkan sinergitas kita. Kebersamaan kita di sini adalah modal SDM besar untuk bisa membangun rakyat secara simultan. Kalau kita bersatu, maka kebijakan dan program yang akan dihasilkan nantinya saling mengisi,” tegasnya.

Ia juga mendorong setiap kementerian agar fokus membangun fungsi masing-masing secara maksimal—baik itu Kementerian Hukum dalam memberikan pelayanan hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) dalam pembangunan sistem imigrasi dan pemasarakatan, maupun Kementerian HAM dalam memperkuat perlindungan dan pemajuan HAM.

Lebih lanjut, Pigai menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh kementerian yang dinilainya telah saling melengkapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Kemenko Kumham Imipas memiliki fungsi strategis dalam merajut kebersamaan, menuntun, dan memimpin antar kementerian. Inilah kekuatan kita untuk membangun bangsa,” tutupnya.

Kegiatan apel pagi lintas kementerian ini berlangsung dengan tertib dan lancar, serta menjadi sarana mempererat komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam lingkup Kemenko Kumham Imipas.



MPW Notaris Kalimantan Selatan Gelar Rapat, Tegaskan Komitmen Menjaga Integritas Profesi



Banjarmasin, AHU_Info – Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Kalimantan Selatan melaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua MPWN Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah sekaligus Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, beserta jajaran anggota dan sekretariat MPWN Kalimantan Selatan.

Dalam arahannya, Ketua MPWN menekankan pentingnya komitmen bersama untuk senantiasa menjaga marwah dan integritas profesi notaris di wilayah Kalimantan Selatan. Ia juga mengingatkan kepada seluruh notaris agar memperhatikan ketentuan terkait cuti, dengan memastikan seluruh administrasi diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan cuti.

“Terima kasih atas kerja keras dan kebersamaan kita semua, sehingga Kalimantan Selatan telah mencapai 100 persen kepatuhan dalam hal Koperasi Merah Putih,” ungkap Nuryanti memberikan apresiasi.

Sementara itu, Plt. Kakanwil yang juga menjabat sebagai Kadivyanhum, Meidy Firmansyah, menyampaikan bahwa penyelenggaraan rapat MPW Notaris ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris.

Rapat dilanjutkan dengan diskusi interaktif mengenai berbagai kendala dan masukan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas MPWN, guna mendorong perbaikan dan penguatan peran MPW Notaris di masa mendatang.





Kemenkum Kalsel Fasilitasi Harmonisasi Produk Hukum Daerah Hulu Sungai Utara



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar rapat harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) pada Senin pagi (14/07/2025), bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Kegiatan ini dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjatul Mardhiyah, dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten HSU, baik secara langsung maupun daring.

Dua Raperbup yang dibahas dalam kegiatan ini mencakup Raperbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada UPT Puskesmas BLUD serta Raperbup tentang Remunerasi pada BLUD RSUD Pambalah Batung. Kedua rancangan peraturan tersebut merupakan bentuk penyesuaian regulasi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola pelayanan publik di bidang kesehatan.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa harmonisasi ini merupakan forum penting untuk menyelaraskan substansi norma dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Sinergitas antarinstansi sangat diperlukan agar produk hukum daerah tidak hanya sah secara formil, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap pelayanan publik yang berkeadilan dan berkepastian hukum,” tegas Anton.

Dalam rapat ini, tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum turut memberikan masukan substansial terhadap pasal-pasal yang dinilai perlu penguatan, khususnya terkait tata kelola keuangan BLUD serta prinsip-prinsip pemberian remunerasi yang adil dan proporsional.

Perwakilan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyampaikan apresiasinya atas fasilitasi dan pendampingan yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, serta berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hasil harmonisasi ini ke tahap selanjutnya hingga pengundangan.

Evaluasi Capaian Kinerja Semester I, Kanwil Kementerian Hukum Kalsel Mantapkan Strategi Semester II



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) atas capaian kinerja dan realisasi anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung pada hari Senin, 14 Juli 2025, bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Banjarmasin.

Hadir dalam kegiatan ini Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah; Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana; serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka. Kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Kegiatan dibuka oleh Anton Edward Wardhana, yang menegaskan bahwa tujuan dari Monev ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja semester pertama serta menyusun langkah-langkah perbaikan dalam rangka pencapaian target di semester kedua. Ia menekankan bahwa semua hal tersebut telah tertuang dalam perjanjian kinerja yang menjadi komitmen bersama seluruh jajaran.

Plt. Kakanwil, Meidy Firmansyah, dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan ini penting sebagai bentuk penyediaan informasi bagi pimpinan baru serta bagian dari akuntabilitas pelaksanaan tugas. Ia menekankan bahwa perjanjian kinerja bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan kontrak kerja tahunan yang harus dilaksanakan secara konsisten.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan target-target dalam perjanjian kinerja tidak hanya tercapai secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata. Melalui monitoring dan evaluasi seperti ini, kita dapat menilai di mana posisi kita saat ini, dan apa saja yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya.



Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka antar jajaran. Diskusi ini menjadi ruang refleksi dan tukar pikiran mengenai capaian kinerja dan kendala yang dihadapi, sekaligus merumuskan solusi serta langkah strategis untuk pengukuran kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), guna menjamin efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pelaksanaan program kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.



© Copyright | Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan

Sinergi Kelembagaan: Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Pelantikan Sekda Provinsi Kalsel



Banjarbaru, Humas_Info – Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah yang diwakili Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (14/7) di Gedung Auditorium DR. K.H. Idham Chalid, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Selatan.

Hadir dalam kegiatan ini jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Kalsel, pimpinan dan perwakilan BUMD, serta tamu undangan dari instansi vertikal, TNI/POLRI, dan tokoh masyarakat.

Rangkaian acara diawali dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Muhammad Syarifuddin, M.Pd sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin.

Setelah pelantikan Sekretaris Daerah, kegiatan dilanjutkan dengan pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai bagian dari upaya penataan struktur organisasi dan penguatan kinerja birokrasi. Dalam kesempatan tersebut, turut dilaksanakan penyerahan dividen secara simbolis dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Agenda berikutnya yaitu pelantikan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan masa jabatan periode 2025–2030, yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan peran BUMD dalam pembangunan ekonomi daerah.

Agenda berikutnya yaitu pelantikan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan masa jabatan periode 2025–2030, yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan peran BUMD dalam pembangunan ekonomi daerah.

Mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan, Gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara birokrasi pemerintahan dengan BUMD untuk mendorong pertumbuhan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Kehadiran perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan pada acara ini merupakan bentuk dukungan, penguatan koordinasi, dan sinergi kelembagaan dalam mendukung agenda strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Kemenkum Kalsel Bangun Kesadaran Hukum Sejak Dini di Kalangan Pelajar SMAN 12 dan SMKN 2 Banjarmasin



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui para Penyuluh Hukumnya menggelar kegiatan penyuluhan bertajuk Pembinaan Kesadaran Hukum Dalam Membangun Budaya Ketaatan dan Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Pelajar sebagai Cikal Bakal Terwujudnya Sekolah Sadar Hukum di SMK Negeri 2 Banjarmasin dan SMA Negeri 12 Banjarmasin.

Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan masa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan diikuti oleh 570 siswa SMKN 2 Banjarmasin dan 185 siswa SMAN 12 Banjarmasin. Turut hadir sebagai pelaksana kegiatan, Dianor selaku Penyuluh Hukum Ahli Muda dan Koordinator JFT Penyuluh Hukum, bersama tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dalam kegiatan tersebut, Penyuluh Hukum mengangkat isu maraknya kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Kondisi ini menjadi perhatian serius yang menuntut peran aktif berbagai pihak, termasuk kalangan penyuluh hukum.

“Pelajar adalah generasi penerus yang harus kita bekali dengan kesadaran hukum sejak dini. Mereka harus tahu hak-haknya, mengenal bentuk-bentuk kekerasan, serta memahami pentingnya taat hukum dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Dianor di hadapan para siswa.

Selain materi tentang bentuk kekerasan terhadap anak, penyuluhan juga difokuskan pada pentingnya pemahaman Kekayaan Intelektual (KI) bagi siswa sekolah. Para pelajar dikenalkan pada jenis-jenis KI, seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, hingga indikasi geografis.

Pemaparan materi disampaikan secara interaktif, disertai diskusi dan sesi tanya jawab yang melibatkan antusiasme peserta. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa menghargai karya cipta orang lain sekaligus mendorong lahirnya inovasi dan kreativitas pelajar yang berbasis hukum. “Melalui pemahaman Kekayaan Intelektual, kita ingin mencetak pelajar yang tidak hanya cerdas, tapi juga inovatif dan menjunjung tinggi penghargaan terhadap hasil karya,” tambah Dianor.

Sebagai tindak lanjut kegiatan, pihak Kanwil Kemenkum Kalsel akan melakukan koordinasi lanjutan dengan pihak sekolah untuk mendorong pembentukan Forum Pelajar Sadar Hukum (FPSH) sebagai percontohan dalam menumbuhkan budaya hukum di kalangan pelajar. Sekolah juga diharapkan melibatkan penyuluh hukum dalam berbagai kegiatan edukatif lainnya.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret Kementerian Hukum dalam mendekatkan layanan hukum ke tengah masyarakat, khususnya di dunia pendidikan, sekaligus mencetak generasi muda yang sadar dan taat hukum sejak dini.

Pelantikan Notaris Pengganti: Komitmen Kemenkum Kalsel Hadirkan Layanan Hukum Tanpa Henti



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Notaris Pengganti pada Selasa (15/07/2025) bertempat di Balai Pertemuan Garuda. Kegiatan ini menandai komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam menjamin keberlangsungan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah, Meidy Firmansyah, dan disaksikan oleh para pejabat Kantor Wilayah. Hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka. Turut hadir pula perwakilan keluarga dari notaris yang dilantik.

Notaris Pengganti yang dilantik adalah Muhammad Taufik Rahman, S.H., yang menggantikan Notaris Hj. Siti Hapsah, S.H., M.Kn. selama masa cuti terhitung sejak tanggal 24 Juli hingga 15 Agustus 2025, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tabalong Nomor 05/KET.CUTI-MPDN KABUPATEN TABALONG/VII/2025.

Dalam sambutannya, Meidy Firmansyah menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kepastian dan kontinuitas pelayanan hukum.

“Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dengan notaris definitif. Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, serta kehati-hatian dalam menjalankan tugas adalah mutlak,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pelaporan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai bentuk akuntabilitas dan pengawasan dalam menjalankan profesi. Meidy berharap, amanah yang telah diberikan dapat dijalankan sebaik-baiknya demi menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Pelantikan ini menjadi bagian dari mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan tidak adanya kekosongan pelayanan hukum di tengah masyarakat.

Meriahkan Hari Pengayoman ke-80, Kanwil Kemenkum Kalsel Siapkan Rangkaian Kegiatan Sederhana Penuh Maknan



Banjarmasin, Humas_Info — Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Pengayoman ke-80 Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan rapat koordinasi guna mempersiapkan rangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh jajaran pegawai serta masyarakat, Selasa (15/7/25).

Rapat dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah, Meidy Firmansyah, didampingi oleh Kepala Divisi PPPH, Anton Edward Wardhana, serta dihadiri oleh pejabat struktural dan fungsional, termasuk panitia pelaksana dari berbagai bidang.

Dalam arahannya, Plt. Kepala Kantor Wilayah menegaskan pentingnya menjadikan peringatan Hari Pengayoman sebagai momentum untuk memperkuat nilai-nilai pengabdian dan integritas di lingkungan Kementerian Hukum.

“Hari Pengayoman bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata pengabdian kita dalam memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat,” tegas Meidy.

Rapat membahas sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangkaian peringatan, antara lain: Pembukaan Rangkaian Peringatan Hari Pengayoman secara virtual; Pembagian sembako sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat; Ziarah ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan; Kegiatan donor darah yang melibatkan pegawai dan masyarakat umum;

Jalan santai dan bazar UMKM, yang akan dirangkaikan dengan kegiatan layanan publik; Layanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai bentuk penguatan akses pelayanan kepada masyarakat; Upacara peringatan dan syukuran Hari Pengayoman, yang akan menjadi puncak kegiatan; dan Pertandingan olahraga dan hiburan internal, seperti badminton dan board games untuk membangun kekompakan antar pegawai.

Seluruh kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan mempertegas citra ASN sebagai pelayan publik yang profesional, humanis, dan berdedikasi.

“Momentum Hari Pengayoman ini kita manfaatkan untuk mempererat sinergi, menebar manfaat, dan memperkuat pelayanan hukum yang inklusif,” tambah Meidy.

Panitia pelaksana akan terus melakukan evaluasi dan koordinasi guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan, sesuai dengan semangat Hari Pengayoman yang ke-80.



Kanwil Kemenkum Kalsel Sosialisasikan Hukum di SMKN 1 dan SMAN 8 Banjarmasin Saat MPLS



Banjarmasin, Humas_Info — Selasa (15/07/2025), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Penyuluh Hukumnya hadir di tengah pelajar dalam rangka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kegiatan penyuluhan hukum ini digelar di SMKN 1 Banjarmasin dan SMAN 8 Banjarmasin dengan tema berbeda sesuai kebutuhan siswa.

Di SMKN 1 Banjarmasin, Tim Penyuluh Hukum yang terdiri atas Dianor, Penyuluh Hukum Ahli Muda, dan Togi, Penyuluh Hukum Ahli Pertama, memberikan materi tentang Kekayaan Intelektual (KI) kepada sekitar 500 siswa baru. Dalam paparannya, Togi menjelaskan pengertian kekayaan intelektual serta pentingnya melindungi dan menghargai karya cipta yang dimiliki.

“Kekayaan intelektual adalah hasil karya cipta yang lahir dari ide, kreativitas, dan inovasi seseorang. Dengan mendaftarkannya, karya kita diakui secara hukum dan terlindungi dari penyalahgunaan oleh pihak lain,” jelas Togi. Penyuluhan ini diharapkan menumbuhkan kesadaran para pelajar akan pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual sejak dini.

Sementara itu, di SMAN 8 Banjarmasin, Tim Penyuluh Hukum menyampaikan materi tentang Kekerasan terhadap Anak. Dianor menjelaskan pengertian dan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yang dilarang oleh undang-undang.

“Anak di bawah usia 18 tahun mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Setiap bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun penelantaran, dapat dipidana,” tegas Dianor.

Diharapkan dengan penyuluhan ini para siswa memiliki pemahaman hukum yang lebih baik dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.



Masa MPLS, Siswa SMA dan SMK Dapat Edukasi Hukum Langsung dari Kanwil Kemenkum Kalsel



Banjar, Humas_Info— Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesadaran hukum generasi muda. Melalui tim penyuluhan hukumnya, Kanwil Kemenkum Kalsel melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum di sejumlah sekolah menengah yang tengah melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Selasa (15/07).

Tim penyuluh yang terdiri dari Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Tulus Achir Cahyadi dan Tutus Bachtiar, hadir langsung untuk memberikan edukasi kepada para siswa. Kegiatan ini menyasar peserta didik baru di SMA Negeri 11 Banjarmasin dan SMK Negeri 1 Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

Dalam kegiatan penyuluhan, para siswa diberikan pemahaman mengenai berbagai persoalan hukum yang marak terjadi di kalangan remaja. Materi yang disampaikan antara lain terkait bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza), praktik perundungan atau bullying, serta risiko hukum dan sosial dari judi online.

Tim Penyuluh Hukum Kemenkum Kalsel menjelaskan, penyalahgunaan Napza tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dapat menyeret pelakunya ke ranah pidana yang serius. Serta menekankan pentingnya membangun budaya saling menghormati di lingkungan sekolah agar tindakan bullying tidak terjadi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa memiliki pemahaman lebih baik mengenai konsekuensi hukum dari perilaku menyimpang dan mampu membentengi diri dari pengaruh negatif di lingkungan sekitarnya. Kegiatan sosialisasi hukum pada masa MPLS akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya pembinaan karakter dan kesadaran hukum generasi muda di Kalimantan Selatan.



Perkuat Pelindungan KIK, Kemenkum Kalsel Koordinasi dengan Disdikbud Provinsi



Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka mendukung pelindungan dan pelestarian budaya daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan terkait Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), pada Senin (14/7/2025).

Kegiatan yang berlangsung di kantor Disdikbud Provinsi ini disambut baik oleh jajaran Dinas. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Seksi Kesenian, Sunjaya, dan Kepala Bidang Kebudayaan, Hilda, beserta jajaran.

“Kami sangat mendukung langkah Kanwil Kemenkum Kalsel ini. Saat ini kami sudah mulai menyiapkan sejumlah data yang berpotensi untuk didaftarkan, dan sedang menyeleksi tambahan potensi lainnya,” ujar Hilda.

Koordinasi ini bertujuan untuk menindaklanjuti proses pendataan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal, yang merupakan kekayaan milik kelompok masyarakat dan menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

“Kami berharap, melalui kerja sama ini, proses pendaftaran dapat segera direalisasikan agar kekayaan budaya lokal tidak lebih dulu diklaim oleh daerah lain,” ujar salah satu anggota Tim KIK Kanwil Kemenkum Kalsel.

Koordinasi teknis lanjutan dijadwalkan akan segera dilaksanakan, termasuk peninjauan dokumen dan data tambahan yang telah disiapkan oleh Dinas. Diharapkan langkah ini dapat meningkatkan jumlah pendaftaran KIK di Kalimantan Selatan serta memperkuat pelestarian budaya daerah secara berkelanjutan. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme dari kedua pihak.



DPRD Banjarbaru Siapkan Ranperda Penting, Kanwil Kemenkum Kalsel Lakukan Harmonisasi



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui tim perancang peraturan perundang-undangan melaksanakan rapat harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Banjarbaru. Kegiatan digelar pada Rabu, (16/07), dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Eryck Yulianto.

Rapat harmonisasi tersebut dihadiri Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Banjarbaru, Hinder Wahyudin, bersama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus IV, V, dan VI DPRD Kota Banjarbaru. Turut hadir tim perancang Kanwil Kemenkum Kalsel yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif atas substansi Ranperda.

Adapun tiga Ranperda Kota Banjarbaru yang dibahas merupakan inisiatif DPRD, yaitu:

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan;
2. Ranperda tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat;
3. Ranperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dalam rapat, disampaikan bahwa keberadaan Peraturan Daerah sebelumnya mengenai pengelolaan kekayaan daerah belum maksimal menjadi payung hukum untuk menggali potensi pendapatan di luar sektor pajak dan retribusi. Oleh karena itu, Ranperda ini dirancang agar lebih komprehensif dalam memfasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi kekayaan daerah secara optimal.

Melalui harmonisasi, Kanwil Kemenkum Kalsel memastikan ketiga Ranperda tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, serta selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Kegiatan harmonisasi ini menjadi bagian dari fungsi pembinaan dan penguatan regulasi daerah, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih tertib di Kota Banjarbaru.

Edukasi Hukum Sejak Dini, Kemenkum Kalsel Sasar Siswa Baru SMA dan SMK



Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Penyuluh Hukum memberikan penyuluhan hukum di dua sekolah pada Rabu, 16 Juli 2025. Kegiatan berlangsung di SMA Mitra Kasih Kabupaten Banjar dan SMKN 3 Banjarmasin, menghadirkan narasumber Dianor dan Togi Leonardo Situmorang.

Di SMA Mitra Kasih, sebanyak 50 siswa baru mengikuti penyuluhan yang membahas isu-isu krusial seperti bahaya narkoba, judi online, etika bermedia sosial, dan kekerasan terhadap anak. Antusiasme siswa tampak tinggi sepanjang kegiatan.

“Saya mewakili pihak sekolah sangat berterima kasih kepada Kementerian Hukum yang telah memberikan penyuluhan kepada anak-anak kami, karena ini sangat bermanfaat sekali. Anak-anak juga jadi tahu tentang hukum, dan mudah-mudahan mereka bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari,” ujar Betlycin Florentina Sitio, guru pendamping SMA Mitra Kasih.

Sementara itu, di SMKN 3 Banjarmasin, sebanyak 500 siswa baru mendapat penyuluhan khusus tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Materi ini diberikan agar pelajar memahami pentingnya menghargai dan melindungi karya cipta di era digital saat ini.

“Sosialisasi seperti ini penting agar pelajar mengenal hak-haknya, khususnya terkait kekayaan intelektual. Harapannya, mereka tak hanya paham tapi juga bisa menghargai dan menjaga karya sendiri maupun orang lain,” ujar Togi Leonardo Situmorang, penyuluh hukum Kanwil Kemenkum Kalsel.

Penyuluhan hukum ini menjadi bagian dari upaya Kemenkum Kalsel dalam membangun kesadaran hukum generasi muda sejak dini, dimulai dari hari-hari pertama mereka mengenal lingkungan sekolah.



Kolaborasi Edukatif di MPLS, Kanwil Kemenkum Kalsel Edukasi 464 Siswa Baru SMAN 9 dan 10 Banjarmasin



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melalui para Penyuluh Hukumnya turut ambil bagian sebagai narasumber dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang digelar di SMAN 9 Banjarmasin dan SMAN 10 Banjarmasin.

Dalam kegiatan ini, dua Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Tulus Achir Cahyadi dan Tutus Bahtiar, tampil memberikan materi yang relevan dan edukatif kepada para peserta didik baru. Materi yang dibawakan mencakup isu-isu penting seperti perundungan (bullying), penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif (napza), serta pengenalan awal mengenai kekayaan intelektual.

Para penyuluh secara aktif mengajak siswa untuk berdiskusi dan memberikan contoh konkret yang dekat dengan kehidupan remaja. Mereka juga menyampaikan pesan-pesan hukum dengan bahasa yang mudah dipahami agar para siswa dapat menghindari perilaku menyimpang sejak dini.

"Kami ingin siswa memahami bahwa tindakan bullying maupun penyalahgunaan narkoba bukan hanya merugikan diri sendiri dan orang lain, tapi juga memiliki konsekuensi hukum yang nyata," ujar Tulus Achir Cahyadi dalam sesi pemaparan.

"Kami harap sejak awal mereka bisa membangun kesadaran hukum dan menjadi generasi yang bertanggung jawab," pungkasnya.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Kanwil Kementerian HAM Kalsel yang turut memberikan pemaparan mengenai hak-hak dasar anak, khususnya sebagai pelajar dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Para narasumber mendorong siswa untuk berani bersuara ketika mengalami pelanggaran hak, serta menghargai hak-hak teman sebaya sebagai bagian dari budaya saling menghormati di lingkungan sekolah.

Antusiasme tinggi ditunjukkan oleh para siswa yang mengikuti kegiatan ini dengan semangat dan keterlibatan aktif. Pihak sekolah pun menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk edukasi hukum dan HAM yang penting bagi pembentukan karakter siswa sejak dini. Kegiatan ini diikuti sebanyak 464 orang siswa yang terbagi sebanyak 252 siswa di SMAN 9 Banjarmasin dan 212 siswa di SMAN 10 Banjarmasin.

Kehadiran penyuluh hukum dalam MPLS ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum Kalimantan Selatan untuk terus mendekatkan layanan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Kanwil Kemenkum Kalsel dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Sepakat Perkuat Kolaborasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual



Banjarmasin, Humas_Info — Dalam upaya memperkuat perlindungan hukum dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) bersama Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Rapat berlangsung pada Rabu (16/07/2025) di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, Riswandi, bersama tim layanan KI, dengan dihadiri perwakilan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel dan Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Banjar Bakula. Rapat ini menjadi wadah diskusi untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam meningkatkan kesadaran dan optimalisasi pendaftaran KI di Kalimantan Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan pentingnya kolaborasi penuh antar pihak untuk mendukung program pendaftaran KI melalui sosialisasi, edukasi, maupun pelatihan bersama. “Dukungan pimpinan kedua belah pihak sangat diperlukan untuk memperkuat kerja sama ini,” ujar Riswandi.

Biro Perekonomian menyampaikan adanya kendala teknis terkait pendaftaran merek produk air minum kemasan dan meminta pendampingan dari Kanwil. Menanggapi hal tersebut, Kanwil Kemenkum Kalsel menyatakan siap memberikan bantuan teknis dan mempercepat proses pendaftaran guna mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. BPAM Banjar Bakula pun menyampaikan akan melakukan koordinasi internal sebelum mengajukan permohonan secara resmi.

Selain itu, Biro Perekonomian menyampaikan komitmen untuk melindungi inovasi daerah dengan mengusulkan penyelenggaraan bimbingan teknis KI bagi pelaku usaha dan SMK binaan. Program Bimtek bersama ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat maupun aparatur tentang pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual.

Pertanyaan mengenai mekanisme pendaftaran KI untuk sektor rumah sakit juga disampaikan dalam rapat ini. Tim Kanwil memberikan penjelasan terkait alur pendaftaran melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan menyatakan siap memberikan pendampingan lebih lanjut.

Seluruh peserta rapat sepakat bahwa pendaftaran KI merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum, melindungi inovasi, serta mendukung ekonomi kreatif di berbagai sektor. Komitmen bersama yang dihasilkan diharapkan dapat segera diwujudkan dalam program nyata untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual di Kalimantan Selatan.

Bahas Perda Berbasis Pancasila, Kemenkum Kalsel Jadi Narasumber di Forum Nasional



Jakarta, PPPH_Info — Upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap proses pembentukan regulasi terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan bertajuk “Rapat Koordinasi Pemantauan dan Peninjauan Rekomendasi Hasil Kajian Kebijakan dan Regulasi Berdasarkan Indikator Nilai Pancasila” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, bertempat di Harmony Ballroom, Holiday Inn, Jakarta.

Kegiatan yang dilaksanakan sejak tanggal 15 hingga 18 Juli 2025 ini diikuti oleh para pemangku kepentingan dari lima provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, dan Kalimantan Selatan. Peserta terdiri dari perwakilan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD, akademisi, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari masing-masing daerah. Kalimantan Selatan sendiri diwakili oleh Nizar Al Farisy, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, yang juga berkesempatan menjadi narasumber dalam kegiatan ini.

Dalam pemaparannya, Nizar menegaskan bahwa proses harmonisasi regulasi yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan berpedoman kuat pada indikator fundamental yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Mulai dari pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi hingga analisis dan evaluasi peraturan daerah, seluruh proses senantiasa diarahkan agar sejalan dengan semangat persatuan, keadilan, serta keberagaman dalam Pancasila.

Beberapa regulasi daerah yang menjadi objek pembahasan dalam rakor ini antara lain: Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 69 Tahun 2018 tentang Gerakan Sholat Subuh Berjamaah; Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca Al-Quran; Peraturan Wali Kota Bima Nomor 71 Tahun 2019 tentang Jumat Khusus; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 3 Tahun 2018 tentang Manokwari Kota Injil; dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan.

Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi BPIP RI, Johan Johor Mulyadi, dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap regulasi dan kebijakan publik tidak hanya taat hukum, namun juga mencerminkan esensi luhur Pancasila sebagai dasar negara.

“Partisipasi aktif kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperkuat komitmen nasional terhadap ideologi Pancasila,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, BPIP berharap dapat memperkuat keselarasan regulasi di tingkat pusat dan daerah agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara serta tetap menjunjung tinggi keberagaman dalam bingkai persatuan Indonesia.

Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Dua Rancangan Regulasi Strategis Pemkab HST



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menyelenggarakan Rapat Harmonisasi terhadap dua rancangan regulasi penting dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), yakni Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Kegiatan harmonisasi yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan ini dihadiri oleh jajaran perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel, serta perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan, Bappeda Litbangda, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjahtul Mardiah yang mewakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana membuka sekaligus memimpin jalannya rapat dengan menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan salah satu tahapan krusial untuk menjamin keselarasan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mencegah potensi disharmoni norma hukum.

“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang konsisten melakukan penyusunan regulasi melalui mekanisme harmonisasi. Ini menjadi bukti nyata bahwa Pemda berkomitmen mewujudkan produk hukum yang berkualitas, aspiratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkap Bahjahtul.

Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah mengatur mekanisme pengadaan, pengelolaan, penyaluran, serta penanggulangan krisis pangan, baik dalam kondisi darurat bencana, gejolak harga pangan, maupun rawan pangan. Ranperda ini diharapkan menjadi landasan operasional dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan di daerah.

Sementara Ranperbup tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam jangka menengah, diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD) dan menengah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dokumen ini akan menjadi pedoman kerja bagi seluruh perangkat daerah selama lima tahun ke depan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Afni Hidayat, menyampaikan bahwa kedua rancangan ini merupakan hasil kerja kolaboratif antar perangkat daerah dalam menjawab tantangan ketahanan pangan dan penguatan tata kelola pembangunan.

“Ranperda Cadangan Pangan adalah bentuk kesiapsiagaan kami dalam menghadapi krisis pangan dan gejolak harga. Sementara Ranperbup Renstra menjadi peta jalan pembangunan agar lebih terarah, terukur, dan sinergis lintas sektor. Kami menyambut baik pendampingan dari Kemenkum Kalsel yang sangat konstruktif dalam proses harmonisasi ini,” ujar Afni.

Dengan dilaksanakannya harmonisasi ini, diharapkan proses penetapan kedua regulasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sesuai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga implementasi kebijakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berjalan lebih efektif dan terarah.

Seleksi Daerah Peacemaker Justice Award 2025 Digelar, Kalsel Siap Kirim Wakil Terbaik ke Tingkat Nasional



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan seleksi daerah peserta Peacemaker Justice Award (PJA) Tahun 2025, Kamis (17/07/2025) bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak sebagai Tim Seleksi Daerah, antara lain Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan Guntur Ferry Fahtar, Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel Anton Edward Wardhana, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin Alimin Ribut Sujono, Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor Dana Hanura, serta perwakilan dari Bagian Pemerintahan, Penyuluh Hukum Kanwil, dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Guntur Ferry Fahtar menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim seleksi dan pendamping peserta selama proses panjang ini.

“Alhamdulillah, penilaian sudah selesai. Terima kasih kepada seluruh tim Panselda PJA yang telah bekerja keras dalam mendampingi para peserta,” ujarnya saat menutup kegiatan. Penilaian terhadap peserta dilakukan secara menyeluruh, mencakup berbagai aspek aktualisasi dan data dukung yang telah diunggah peserta. Kepala Bagian Pemerintahan Provinsi Kalsel, Maman S., menyatakan bahwa proses penilaian berjalan sesuai jadwal.

Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, mengungkapkan bahwa dari 25 peserta awal, terdapat lima peserta yang tidak melengkapi data dukung yakni dua dari Kota Banjarmasin, dua dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan satu dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Meskipun demikian, ia menyampaikan harapan besar terhadap peserta yang telah mengikuti seleksi secara lengkap. “Kita berharap peserta yang telah dinilai ini nantinya menjadi wakil dari Kalimantan Selatan pada malam Anugerah PJA 2025,” ungkapnya.

Sementara itu, Dianor selaku perwakilan tim teknis menyampaikan bahwa peserta yang memenuhi data dukung dan dinyatakan lulus akan menerima penghargaan Anubhawa Sasana Jagadita dan NLP.

“Peserta terbaik nantinya akan mewakili Kalimantan Selatan di Jakarta untuk kembali berjuang di ajang nasional Anugerah PJA,” terangnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi penilaian terhadap masing-masing peserta oleh seluruh anggota tim seleksi. Dengan selesainya proses seleksi daerah ini, Kalimantan Selatan semakin mantap untuk mengirimkan wakil terbaiknya dalam ajang Peacemaker Justice Award 2025 di tingkat nasional.



Kemenkum Kalsel Terima Kunjungan Bappedalitbang Tanah Bumbu Bahas Pendaftaran Kekayaan Intelektual



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima kunjungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Tanah Bumbu pada Kamis (17/07/2025). Diskusi menarik tersebut berlangsung di ruang pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait tata cara pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas berbagai inovasi yang telah dihasilkan oleh Bappedalitbang Tanah Bumbu.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, Riswandi, bersama tim pelayanan KI, memberikan arahan dan penjelasan awal mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi karya cipta dan inovasi daerah.

Bappedalitbang Tanah Bumbu mengungkapkan bahwa pihaknya telah memiliki sejumlah inovasi yang direncanakan untuk didaftarkan, namun masih membutuhkan pembekalan terkait prosedur, persyaratan, dan dokumen pendukung yang diperlukan.

Sebagai tindak lanjut, disepakati bahwa pembekalan awal tentang wawasan umum Kekayaan Intelektual akan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting pada 25 Juli 2025, dengan narasumber dari tim Layanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel.

Diharapkan, hasil dari pembekalan ini dapat mendorong Bappedalitbang Tanah Bumbu untuk segera mendaftarkan setidaknya 15 karya cipta inovatif yang mereka miliki.

“Kami menyambut positif inisiatif Bappedalitbang Tanah Bumbu dan siap mendukung penuh upaya pendaftaran Kekayaan Intelektual atas inovasi daerah. Kami berkomitmen membantu mulai dari pembekalan hingga proses pendaftaran,” ujar Riswandi.

Kegiatan koordinasi ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum terhadap hasil karya daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis inovasi.



FGD Bahas Lima Perda Perumda Murakata, Kanwil Kemenkum Kalsel Beri Masukan Substansial



Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka memperkuat landasan hukum dan memastikan keselarasan peraturan daerah dengan regulasi nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait lima Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Murakata.

FGD ini berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel pada Kamis, (17/07), dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana.

Kegiatan ini dihadiri para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil serta Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Syahruli beserta tim.

Dalam sambutannya, Anton Edward menyampaikan pentingnya forum ini sebagai wadah diskusi yang terbuka dan komprehensif untuk mengkaji substansi lima Perda yang telah ada di Hulu Sungai Tengah. Hal ini guna memastikan kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip pembentukan peraturan yang baik.

Syahruli kemudian menyampaikan pengantar mengenai latar belakang FGD lima Perda dimaksud. Masing-masing terkait dengan pendirian dan pengelolaan entitas Perumda Murakata sebagai BUMD strategis daerah.

FGD ini menjadi sarana untuk menelaah pasal demi pasal secara mendalam. Tim perancang Kanwil Kemenkum Kalsel bersama perwakilan Pemkab Hulu Sungai Tengah membedah ketentuan dalam kelima Perda tersebut, mengidentifikasi beberapa pasal yang masih perlu penguatan atau penyesuaian agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta memenuhi asas legalitas dan efektivitas hukum.

Beberapa poin penting yang disoroti dalam diskusi mencakup kejelasan mekanisme pendirian Perumda agar sesuai dengan Peraturan terbaru, sistem pengelolaan keuangan, pengawasan internal, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran Perorangan bagi UMKM di Kabupaten Tapin bagi Notaris di Kabupaten Tapin



Tapin, AHU_Info - Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi pendirian badan usaha, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Hukum (AHU) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perorangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tapin, Kamis (17/07).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya mendirikan Perseroan Perorangan sebagai bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan usaha. Selain itu, pendampingan ini juga memfasilitasi pelaku UMKM agar lebih mudah dalam memahami dan melakukan proses pendaftaran Perseroan Perorangan secara mandiri, cepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bertempat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tapin, kegiatan ini dihadiri oleh 30 orang peserta dari UMKM Kabupaten Tapin. Dalam sosialisasi tersebut diisi materi oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari dan Pegiat Usaha Kabupaten Tanah Laut, Hanik Timur Permata selaku Pemilik Usaha Galyna Heiwa Jaya Abadi.

Materi pertama disampaikan oleh Hanik Timur Permata, selaku narasumber yang menjelaskan secara rinci mengenai konsep dan manfaat pendirian Perseroan Perorangan. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa bentuk badan usaha ini sangat relevan bagi pelaku UMKM karena memiliki sejumlah keunggulan, antara lain:

Tanggung jawab terbatas bagi pemilik usaha, merupakan kepemilikan tunggal yang memungkinkan satu orang sebagai pemegang saham sekaligus direktur. Selanjutnya, modal yang terjangkau, sesuai kemampuan UMKM serta proses pendirian yang sederhana dan efisien, serta dapat dilakukan secara daring. Selain itu, Hanik juga menguraikan dampak positif yang dapat dirasakan pelaku UMKM ketika telah memiliki legalitas usaha, seperti kemudahan akses pembiayaan, kredibilitas di mata konsumen dan mitra, serta perlindungan hukum apabila terjadi sengketa usaha di kemudian hari.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi penayangan video alur pendaftaran Perseroan Perorangan oleh moderator, yang disimak dengan antusias oleh seluruh peserta. Penayangan ini memberikan gambaran praktis dan mudah dipahami mengenai langkah-langkah pendaftaran, mulai dari pengisian data hingga penerbitan sertifikat.

Menariknya, dalam kegiatan ini juga disediakan layanan langsung pendaftaran Perseroan Perorangan di tempat, di mana peserta yang telah membawa dokumen persyaratan dapat langsung melakukan proses pendaftaran dan memperoleh sertifikat pendirian.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMKM di Kabupaten Tapin semakin terdorong untuk segera mendaftarkan usaha mereka dalam bentuk Perseroan Perorangan, sebagai langkah strategis dalam meningkatkan daya saing, legalitas, dan perlindungan hukum usaha mereka.

Kemenkum Kalsel Dorong Optimalisasi Pemenuhan Dokumen Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Balangan dan Tabalong



Balangan dan Tabalong, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan kegiatan koordinasi pemenuhan dokumen penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 dengan Pemerintah Kabupaten Balangan dan Pemerintah Kabupaten Tabalong,

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana didampingi Ketua Tim Kerja Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum, Eldy Prasetya Setiawan, dalam rangka mendorong pencapaian target IRH yang lebih optimal di tahun mendatang.

Dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Balangan, tim disambut oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Setda Balangan. Berdasarkan hasil penilaian mandiri, Kabupaten Balangan meraih nilai IRH sebesar 99,1 untuk tahun 2025, meningkat dari 98,62 di tahun sebelumnya dan tetap mempertahankan kategori AA (Istimewa).

Kendati capaian ini menggembirakan, terdapat catatan terkait kurangnya pemenuhan data dukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kerja menyarankan agar data pendukung dapat dilengkapi dengan pelatihan sejenis di bidang hukum atau dokumen pendukung lainnya.

Sementara itu, pada kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Tabalong, tim disambut langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong. Dalam koordinasi tersebut, diketahui bahwa nilai IRH Kabupaten Tabalong juga mencapai 99,1, meningkat dari 98,14 pada tahun 2024, dan juga dikategorikan sebagai AA (Istimewa).

Namun, kendala serupa ditemukan di Tabalong, yaitu minimnya pelaksanaan pelatihan fungsional bagi perancang peraturan perundang-undangan, terutama karena beberapa pejabat terkait masih berstatus calon ASN. Tim Kantor Wilayah kembali memberikan solusi alternatif berupa bukti pelatihan bidang hukum yang relevan, atau pernyataan tertulis dari pejabat eselon terkait.

Kegiatan koordinasi juga dimanfaatkan untuk mendiskusikan program lain di bawah naungan Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Paralegal Justice Award, dan Desa Sadar Hukum.

Kepala Bagian Hukum dari kedua kabupaten menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan perhatian dari Kantor Wilayah. Mereka berharap koordinasi dan pendampingan yang dilakukan dapat terus ditingkatkan guna mendukung capaian maksimal dalam penilaian IRH di tahun-tahun mendatang.

Sebagai tindak lanjut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan akan terus menjalin koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah guna mengatasi kendala yang ada serta meningkatkan kualitas pemenuhan dokumen IRH, sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam upaya reformasi hukum nasional di wilayah Kalimantan Selatan.

DJKI Tanggapi Fatwa MUI Jatim terkait Sound Horeg



© Copyright | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) menanggapi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur (MUI Jatim) yang menyatakan bahwa penggunaan sound horeg dengan volume berlebihan serta mengandung unsur kemaksiatan adalah haram. Fatwa ini juga merekomendasikan agar Kemenkum untuk tidak mengeluarkan legalitas berkaitan dengan sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan dan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku.

DJKI menegaskan bahwa suatu ekspresi atau pertunjukan seni secara deklaratif akan mendapatkan hak cipta ketika dipertunjukkan ke publik. Namun jika pelaksanaannya berlebihan dan tidak terkontrol, maka berpotensi mendatangkan permasalahan. Apalagi jika sebuah pertunjukan seperti sound horeg yang dilakukan di ruang terbuka atau pemukiman yang melibatkan penonton dari berbagai kalangan dan rentang usia.

“Sebagai bentuk ekspresi seni, sound horeg harus mengikuti pada norma agama, norma sosial, dan ketertiban umum. Jika sudah menimbulkan kerusakan atau permasalahan, tentu bisa dibatasi. Apalagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memuat pembatasan tegas,” tegas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, Jumat (18/7/2025).

“Pasal 50 UU Hak Cipta berbunyi setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara,” lanjutnya.

DJKI menyoroti bahwa fatwa MUI Jatim ini tidak sepenuhnya melarang sound horeg. Penggunaan dengan intensitas suara secara wajar untuk berbagai kegiatan positif, seperti resepsi pernikahan, pengajian, shalawatan dan lain-lain, serta steril dari hal-hal yang diharamkan hukumnya boleh.

Mengingat urgensi dan eskalasi pengaturan aktivitas sound horeg ini, DJKI berharap adanya regulasi khusus seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur perizinan dan pelaksanaan kegiatannya.

“Jadi yang terpenting adalah mengatur perizinan dan melakukan monitoring saat pelaksanaan sound horeg, sehingga keterlibatan instansi-instansi yang lebih berwenang menjadi sentral terkait hal ini,” ungkap Razilu.

Razilu juga mengingatkan sebagai pertunjukan seni, event organizer sound horeg juga sebaiknya mengatur perizinan atau membayar royalti. Hal ini dikarenakan selama ini sound horeg banyak menggunakan materi lagu dan musik milik kreator lain untuk tujuan komersial.

Sebelumnya, MUI Jatim menerbitkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg yang berlaku sejak 12 Juli 2025. Fatwa tersebut mengatur agar sound horeg digunakan dengan intensitas suara yang wajar, tidak melanggar hak asasi warga lainnya, tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah, tidak membahayakan kesehatan, dan tidak menimbulkan mudarat. Penggunaan sound horeg yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain pun wajib mendapatkan ganti rugi. Fatwa ini juga mendorong penggunaan sound horeg untuk berbagai kegiatan positif. Untuk informasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jatim telah berkoordinasi dan menyamakan persepsi dengan MUI Jatim pada Rabu, 16 Juli 2025.

Secara terpisah Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah turut mencermati respons DJKI yang mengedepankan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan penghormatan terhadap norma sosial dan keagamaan.

“Fatwa MUI Jatim menjadi pengingat penting bahwa ekspresi seni pun perlu memperhatikan kepatutan serta ketertiban umum. Di tingkat wilayah, kami siap bersinergi dengan instansi terkait, termasuk tokoh agama dan pemerintah daerah, untuk memastikan aktivitas yang berkaitan dengan kekayaan intelektual tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat dan hukum yang berlaku,” ucapnya.





**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](https://www.kemenkumkalsel.go.id)



[@kemenkumkalsel](https://twitter.com/@kemenkumkalsel)



kalsel.kemenkum.go.id